BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Setiap daerah sudah diberikan kewenangan untuk mengatur sumber daya yang dimilikinya, Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri (Wurangian, 2013)

Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi atau biasa dikenal dengan otonomi daerah mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang "Pemerintahan Daerah" dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang "Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah". Pemberlakuan kedua Undang-Undang ini berkonsekuensi pada perubahan pola pertanggungjawaban daerah atas dana yang dialokasikan.

Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi adalah memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke

pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah (**Rudiansyah,2003**)

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, berasal dari :

1. hasil pajak daerah
2. hasil retribusi daerah
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain PAD yang sah.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Perubahan (Rp)	Pertumbuhan %
2009	369.137.442.213	360.152.627.690	-	-
2010	416.030.066.849	441.863.068.294	81.710.440.604	22,68%
2011	719.988.881.243	833.254.175.288	391.391.106.994	88,58%
2012	933.920.994.572	1.005.583.424.429	172.329.249.141	20,68%
2013	1.407.759.106.133	1.442.775.238.323	437.191.813.894	43,48%
2014	1.808.509.055.075	1.716.057.298.378	273.282.060.055	18,94%
2015	2.066.246.830.526	1.859.694.643.505	143.637.345.127	7,94%

Sumber : DPKAD Kota Bandung (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 cenderung

berfluktuatif. Pada tahun 2012 Pendapatan Asli Daerah menurun sebesar 20,68%, pada tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 43,48%, pada tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar 18,94%, namun pada tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan drastis sebesar 7,94%.

Tabel 1.2
Sumber dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

Tahun	Sumber PAD			
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah
2011	667.106.811.687	71.684.532.455	10.328.428.076	84.134.403.070
2012	820.563.651.111	78.649.880.372	7.227.067.446	99.142.825.500
2013	1.194.087.447.016	115.508.351.284	12.069.972.667	121.109.467.356
2014	1.399.598.856.917	99.192.319.387	9.356.757.469	207.909.364.605
2015	1.494.147.377.053	64.985.847.830	8.602.757.430	291.958.661.192

Sumber: DPKAD Kota Bandung (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 diantara semua komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah merupakan penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga muncul anggapan bahwasannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) identik dengan Pajak Daerah. Komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas menjadi penerimaan daerah yang tentunya akan terus digali baik yang sudah ada maupun sumber penerimaan baru yang potensial.

Berkaitan dengan hal tersebut, kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, Priana Wirasaputra menyatakan pemasukan pajak tak mencapai target

Pendapatan Asli Daerah pada 2015. Paling banter tercapai 90 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1,6 triliun. Berbagai faktor tidak tercapainya target diantaranya daya beli menurun dan target terlalu tinggi. Menurut priana gencarnya razia kepada penunggak pajak dan kepada yang belum bayar pajak tetap tak mencapai target. Selama 2015 saja baru 1.100 pengusaha khususnya restoran yang menyetorkan pajaknya. Objek pajak di kota Bandung ada delapan jenis yaitu pajak restoran, tempat hiburan, reklame, pajak penerangan jalan, parkir, BPHTB (Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), PBB(tribunnews.com, 2015). Terdapat satu jenis pajak yang menarik untuk diteliti atas pajak yang dikelola oleh pemerintah Kota Bandung yaitu pajak reklame, karena laju pertumbuhan atas penerimaan pajak reklame menunjukkan penurunan setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Kota Bandung

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Perubahan (Rp)	Pertumbuhan (%)
2009	10.073.180.229	11.668.650.015	-	-
2010	22.000.000.000	11.762.900.321	94.250.306	0,81%
2011	12.000.000.000	16.766.921.323	5.004.021.002	42,88%
2012	15.500.000.000	18.575.238.358	1.808.317.035	10,79%
2013	18.500.000.000	17.603.910.300	(-971.328.058)	(-5,23)%
2014	24.000.000.000	23.641.404.085	6.037.493.785	34,30%
2015	30.000.000.000	18.107.052.336	5.534.351.749	23,41%

Sumber: Disyajak Kota Bandung (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat laju pertumbuhan Pajak Reklame di Kota Bandung berfluktuatif. Pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 1.808.317.035 atau sebesar 10,79% dan terjadi penurunan drastis pada tahun 2013 sebesar (-971.328.058) atau sebesar (-5,23)%, sama halnya pada tahun 2015

mengalami penurunan kembali sebesar 23,41%. Hal tersebut terjadi karena sedikitnya 5.279 unit reklame yang tersebar di jalan Kota Bandung tidak berizin. Bila dianggarkan mencapai Rp 19.203.719.203. Ada pun reklame yang tidak berizin tersebut sesuai dengan jenis reklame di JPO 15 unit, Bando Jalan 79 unit dan billboard sebanyak 5.185 unit (**galamedianews.com, 2015**). Telah terjadi reklame dengan materi iklan rokok yang terletak di perempatan Jalan A Yani-Jalan Laswi. Reklame berukuran 10x5 meter ini, telah berdiri sekitar dua tahun lalu, namun tanpa izin resmi. Tidak jauh dari situ ada reklame dengan materi iklan rokok namun beda merek, dengan ukuran 8x12 meter juga tidak memiliki izin. Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pajak Disyajak Kota Bandung, Apep Insan Parid mengatakan untuk menghindari tunggakan maka mekanismenya pajak harus dibayar dulu, lalu akan keluar izin dari BPPT(**pojokjabar.com, 2016**).

Maka salah satu komponen pajak daerah yang tertarik untuk diteliti adalah Pajak Reklame. Dengan pemungutan pajak reklame tersebut pemerintah Kota Bandung telah memiliki salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar. Sekarang yang menjadi permasalahannya adalah apakah pemungutan dan ataupun perolehan atas pajak reklame tersebut telah berjalan efektif ataukah belum.

Efektifitas pemungutan pajak menggambarkan bagaimana kinerja suatu pemerintahan. Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan **Mahmudi (2010:143)**. Menurut **Halim (2004:108)** dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan

ekstensifikasi. Upaya atas ekstensifikasi dan intensifikasi yang dapat dilakukan pemerintah daerah guna meningkatkan pajak daerah adalah melalui peningkatan pengelolaan pajak daerah dengan baik, yang salah satunya adalah dengan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah itu sendiri.

Apabila target telah sesuai dengan potensi yang sesungguhnya, kemudian terjadi penurunan penerimaan maka hal tersebut dapat diakibatkan oleh kurang optimalnya pemungutan yang dilakukan, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kebocoran-kebocoran dalam sistem pemungutan pajak reklame tersebut. Oleh sebab itu dalam menetapkan target, hendaknya Pemerintah Kota Bandung harus disesuaikan dengan potensinya yang cukup besar apabila dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar kepada Pendapatan Asli Daerah dari pos pajak daerah khususnya dari pajak reklame.

Penelitian-penelitian mengenai kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah ini hasil penelitiannya menunjukkan hasil yang belum konsisten antara peneliti yang satu dengan peneliti lainnya. Penelitian Riska Kumala (2015) menyatakan yang hasil penelitiannya bahwa pengaruh kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diuji secara parsial berpengaruh positif. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Indrawan (2014) bahwa kontribusi Pajak Reklame tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Riska Kumala Dewi (2015) dengan judul pengaruh kontribusi pajak hiburan dan

pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah yang memperoleh hasil bahwa kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bandung berpengaruh positif. Sedangkan pada penelitian ini akan melakukan penelitian yang variabel independennya efektivitas dan kontribusi pajak reklame pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul :

“Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah” (Studi Kasus Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Seberapa besar tingkat efektivitas pemungutan Pajak Reklame.
2. Seberapa besar tingkat kontribusi pemungutan Pajak Reklame.
3. Seberapa besar Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
4. Apakah efektivitas pemungutan Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Apakah kontribusi pemungutan Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

6. Apakah efektivitas dan kontribusi pemungutan Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Reklame.
2. Tingkat kontribusi pemungutan Pajak Reklame.
3. Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
4. Pengaruh efektivitas pemungutan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli daerah.
5. Pengaruh kontribusi pemungutan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.
6. Pengaruh efektivitas dan kontribusi pemungutan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi :

1. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan, khususnya mengenai pengaruh efektivitas dan kontribusi pemungutan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan dapat memberi masukan yang sifatnya mengarah pada perbaikan, dan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi mengenai efektivitas pemungutan Pajak Reklame, kontribusi pemungutan Pajak Reklame, dan Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pustaka dan bahan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pemungutan Pajak Reklame, kontribusi pemungutan Pajak Reklame, dan Pendapatan Asli Daerah yang dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi tambahan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada kantor Pemerintah Daerah Kota Bandung yang khususnya dilakukan pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang berlokasi di JL. Wastukencana No. 2 Kota Bandung. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini adalah dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017.